

DAFTAR PUSTAKA

Buku

R. Soesilo. *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”*, (Bogor: Politea, 1995),

S.R. Sianturi, *“Hukum Pidana Militer Di Indonesia”*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia ,2010).

Laden Marpaung, *“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”*, Cetakan ke 6. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. *“Hukum Pidana”*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015).

Adami Chazawi. *“Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana”*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Soegiri dkk, *“30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara Republik Indonesia”*, (Jakarta: CV Indra Djaja, 1976).

Dini Dewi Heniarti, *“Sistem Peradilan Militer Di Indonesia: Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaruan Hukum Nasional”*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).

C S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992),

E Utrecht / Moh. Saleh Djindang, 1983,

J C T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, *“Pelajaran Hukum Indonesia” yang dikutip oleh C S T Kansil, 1992,*

- H M N Purwosutjipto, *Pengantar Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1987,
- Teguh Prasetyo. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. (Bandung: Nusa Media, 2019),
- Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012),
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, (Semarang: Agung Press, 1989),
- Satjipto Raharjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986),
- Syahrul Fauzul Kabir, “Kejahatan dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 2, (2019) ,
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terjemahan Tristam P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2003),
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto, 2013),
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987),
- G.W. Bawengan, *Teknik Pemeriksaan dan Kasus-kasus Kriminil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974),
- Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung dalam Demi Keadilan, Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016),

Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan evaluasi hukum tentang putusan pengadilan militer dalam perkara koneksitas* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1996),

HM Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015),

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),

Dr. Lusla Sulastrl, *Buku Ajar: Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021),

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001),

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009,

Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005),

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi,

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah di dalam Undang Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut
UU Tipikor).

Umdang-Undang Nomor 39 tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Tentara/Militer (KUHPM),

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI,

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung,

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 mengenai Hukum Disiplin Militer,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Organisasi Kejaksaan
Republik Indonesia,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021

Surat Keputusan Bersama Menhamkam dan Menteri Kehakiman No. KEP/10/M/XII/1983 M.57.PR.09.03.th.1983 tertanggal 29 Desember 1983 tentang Tim Tetap Penyelidikan Perkara Pidana Koneksitas, Keputusan Pangab No. KEP/01/P/I/1984 tertanggal 20 Januari 1985 lampiran “K” tentang Organisasi dan Prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI, SEMA No. 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Jurnal

Dr. M. Syamsa Ardisasmita, kppu.go.id, “*KPK: Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-anggoucement Untuk Tata Kelola Pemerintah Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel*”, <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf> ,

DR. Bambang J S, “*Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakkan Hukum: Laporan Penelitian*”, <http://repositoryhukum.untagsmg.ac.id/137/1/LAPORAN%20PENELITIAN%20BAMBANG%20JOYO%20SUPENO.pdf>,

A. P. Sabana, “*Polemik Sengketa Kewenangan Penetapan Tersangka Perkara Koneksitas*”,

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/polemik-sengketa-kewenangan-penetapan-tersangka-perkara-koneksitas-oleh-azalia-purbayanti-sabana-s-h-m-h-07-09>

Letkol Chk Parluhutan Sagala, “*Tinjauan Putusan Terhadap Penyimpangan Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Koneksitas*”,

<https://www.dilmiltama.go.id/home/e-journal/HukumAcaraPemeriksaanKoneksitas.pdf> ,

E-journal.uajy.ac.id. “*BAB III Penutup*”, <http://e-journal.uajy.ac.id/20929/4/HK121943.pdf> ,

Tommy DP, “*Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi*”,

<https://www.neliti.com/publications/3018/penerapan-hukum-militer-terhadap-anggota-tni-yang-melakukan-tindak-pidana-desers#:~:text=Dalam%20hal%20terjadinya%20suatu%20tindak,Undang%20Nomor%2031%20Tahun%201997> ,

Septa Candra, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” *Jurnal Prioris*, vol. 3, no. 3, (2012),

Syahrul Fauzul Kabir, “Kejahatan dan Hukuman: Tantangan Filosofis Determinisme-Kausal Terhadap Pertanggungjawaban Pidana” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 49, no. 2, (2019) ,

Putusan

Putusan Nomor:44-K/Koneksitas/PMT-II/AD/VIII/2022

Putusan Nomor:32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023

Website

Kemdikbud.go.id, *“Tentara Nasional Indonesia-Ensiklopedia”*

https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia ,

Kemdikbud.go.id *“Melihat Lebih Dekat Sejarah Tentara Nasional Indonesia”*,

<http://ditsmp.kemdikbud.go.id/melihat-lebih-dekat-sejarah-tentara-nasional-indonesia/> ,

Dilmilti3-surabaya.go.id, *“Sejarah Peradilan Militer”*, <https://dilmilti3-surabaya.go.id/sejarah-peradilan-militer/> ,

Dilmiltama.go.id, *“Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia”*,

<https://www.dilmiltama.go.id/home/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan-militer.html> ,

Dilmil-bandung.go.id, *“Sejarah Peradilan Militer Di Indonesia”*, <https://dilmil-bandung.go.id/sejarah/> ,

Dilmil-yogyakarta.go.id, *“Sejarah Dilmil”*, <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/sejarah-dilmil/> ,

Peraturan.bpk.go.id, *“Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1950: Menetapkan*

“Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan”

(Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang

Federal), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37969/uu-no-5-tahun-1950> ,

Kompas.com, *“Kejagung Kembali Tetapkan Brigjen Yus Adi Kamrullah di Kasus*

Korupsi Dana Tabungan Perumahan Angkatan Darat” ,

[https://nasional.kompas.com/read/2023/05/10/10100841/kejagung-](https://nasional.kompas.com/read/2023/05/10/10100841/kejagung-kembali-tetapkan-brigjen-yus-adi-kamrullah-di-kasus-korupsi-dana)

[kembali-tetapkan-brigjen-yus-adi-kamrullah-di-kasus-korupsi-dana](https://nasional.kompas.com/read/2023/05/10/10100841/kejagung-kembali-tetapkan-brigjen-yus-adi-kamrullah-di-kasus-korupsi-dana) ,

Kompas.com, “*Kasus Korupsi TWP AD, Kerugian Negara Mencapai Rp 127,7 Miliar*” <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/11/07243621/kasus-korupsi-twp-ad-kerugian-negara-mencapai-rp-1277-miliar>). ,

Kompas.com , “*Kasus Korupsi TWP AD, Jaksa Tuntut Kolonel Cori Wahyudi 15 Tahun Penjara*”,
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/16551031/kasus-korupsi-twp-ad-jaksa-tuntut-kolonel-cori-wahyudi-15-tahun-penjara> ,

Pusat Edukasi Antikorupsi, “*Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> ,

Kukuh Galang Waluyo, “*Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya*”, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> ,

Hukumonline.com, “*Mengurai Sengkarut Penanganan Perkara Koneksitas*”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-sengkarut-penanganan-perkara-koneksitas-lt64ddca934dfb8/>

Reda Manthovani. “*Mengurangi Sengkarut Penanganan Perkara Koneksitas*” ,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-sengkarut-penanganan-perkara-koneksitas-lt64ddca934dfb8/> ,

SOP Tesis MH UPH

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Nomor:008/SKD/FH-UPH/VIII/2022 tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Fakultas Hukum Universitas

Pelita Harapan (2022)

